

Analisis Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Studi Kasus Dampaknya terhadap Pemerataan Akses Pendidikan di SMKN 2 Praya Tengah

Wahyu Ahady Irnawan^{1*}

Program Studi Magister Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram

*Corresponding Author:

Wahyu Ahady Irnawan
Program Studi Magister Administrasi
Pendidikan Pascasarjana
Universitas Mataram, Indonesia
Email: wahyuirawan81@gmail.com

Diajukan : 8 Juni 2025

Disetujui : 19 Juni 2025

Dipublikasi : 20 Juni 2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMKN 2 Praya Tengah. Kebijakan zonasi dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan dengan mendekatkan siswa ke sekolah terdekat dari domisilinya. Metode yang digunakan adalah evaluatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengacu pada enam indikator utama pelaksanaan zonasi, yaitu pemerataan akses pendidikan, distribusi siswa, tantangan kapasitas, persepsi masyarakat, mutu pendidikan antarwilayah, serta strategi adaptasi sekolah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan zonasi mampu meningkatkan keterjangkauan siswa dari wilayah pedesaan dan keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan negeri, sekaligus mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Namun demikian, tantangan serius muncul dalam bentuk kelebihan kapasitas ruang kelas, keterbatasan fasilitas, peningkatan beban guru, resistensi masyarakat terhadap pembatasan jalur prestasi, serta ketimpangan kualitas antar sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan zonasi sangat bergantung pada dukungan kebijakan lanjutan yang menyeluruh, termasuk penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, serta komunikasi dan partisipasi publik yang efektif. Zonasi perlu diimplementasikan sebagai bagian dari strategi reformasi pendidikan yang menyeluruh dan berkeadilan.

Kata Kunci: kebijakan zonasi, pemerataan pendidikan, PPDB, SMKN 2 Praya Tengah, kualitas pendidikan, akses pendidikan.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin dan difasilitasi oleh negara tanpa diskriminasi. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan berupaya untuk mewujudkan akses pendidikan yang adil dan merata, salah satunya melalui kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan praktik diskriminatif dalam penerimaan siswa baru dan memastikan bahwa seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas di sekolah negeri di wilayahnya. Zonasi juga diharapkan dapat mendorong pemerataan mutu pendidikan antar wilayah (Kemendikbud, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB, sistem zonasi dirancang untuk mendekatkan peserta didik dengan sekolah serta mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini

menimbulkan sejumlah kontroversi dan tantangan, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki distribusi sekolah yang merata atau kualitas sekolah yang setara. Sejumlah pihak menyatakan bahwa penerapan zonasi belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan keadilan pendidikan karena keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah tertentu (Yunus, 2020).

Dalam konteks daerah seperti Lombok Tengah, khususnya di SMKN 2 Praya Tengah, kebijakan zonasi memiliki dampak yang khas. Sekolah ini berada di wilayah yang cukup strategis tetapi masih menghadapi persoalan terkait daya tampung, persebaran calon siswa, dan kualitas infrastruktur sekolah di sekitarnya. Implementasi kebijakan zonasi di daerah ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana zonasi telah berkontribusi terhadap pemerataan akses pendidikan dan bagaimana dampaknya terhadap keadilan sosial bagi calon peserta didik dari berbagai latar belakang ekonomi dan geografis? Analisis

mendalam terhadap dampak kebijakan ini menjadi penting untuk merumuskan strategi perbaikan ke depan.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berdampak positif terhadap peningkatan akses bagi siswa dari kalangan menengah ke bawah, namun sekaligus memunculkan resistensi dari masyarakat perkotaan yang terbiasa memilih sekolah unggulan tanpa batas wilayah (Firmansyah & Rasyid, 2021). Kebijakan ini dianggap menggeser paradigma masyarakat dari orientasi prestasi menuju keadilan spasial, meskipun pada tahap awal pelaksanaannya banyak sekolah dan orang tua mengalami kebingungan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan zonasi sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, infrastruktur sekolah, dan partisipasi masyarakat.

Secara teoretis, kebijakan zonasi mencerminkan prinsip-prinsip teori keadilan distributif yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya secara adil untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Rawls, 1971). Dalam konteks pendidikan, ini berarti setiap anak berhak mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografisnya. Namun, ketimpangan distribusi kualitas sekolah, keterbatasan guru, dan perbedaan daya dukung antar wilayah menjadikan pelaksanaan zonasi tidak selalu berjalan mulus (Rasyid, 2019). Oleh karena itu, evaluasi berbasis konteks lokal sangat diperlukan untuk mengetahui dampak riil kebijakan ini di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan zonasi dalam PPDB di SMKN 2 Praya Tengah dan dampaknya terhadap pemerataan akses pendidikan. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk respons dari pihak sekolah, orang tua, dan siswa. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem zonasi dalam mendorong keadilan dan pemerataan pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMKN 2 Praya Tengah serta dampaknya terhadap pemerataan akses pendidikan. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena

kebijakan zonasi secara kontekstual dan menyeluruh dalam lingkungan sekolah tertentu. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menggali dinamika sosial, persepsi para pemangku kepentingan, serta realita implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di SMKN 2 Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekolah ini dipilih karena merupakan salah satu sekolah negeri kejuruan yang menerapkan kebijakan zonasi dalam PPDB serta memiliki karakteristik wilayah dan jumlah pendaftar yang beragam. Selain itu, sekolah ini juga berada di daerah semi-perkotaan yang menjadi pertemuan antara calon siswa dari wilayah pinggiran dan pusat kota, sehingga berpotensi memperlihatkan ketimpangan atau pemerataan akses pendidikan akibat kebijakan zonasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, panitia PPDB, guru, orang tua siswa, dan siswa yang diterima melalui jalur zonasi. Observasi dilakukan untuk melihat praktik pelaksanaan PPDB serta dampaknya terhadap dinamika di lingkungan sekolah. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi petunjuk teknis PPDB, data siswa baru, peta zonasi, dan notulen rapat. Teknik triangulasi digunakan untuk menjamin validitas data melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan berdasarkan fokus penelitian, yaitu implementasi zonasi dan dampaknya terhadap pemerataan akses. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan matriks tematik, untuk memudahkan analisis hubungan antar temuan. Tahap terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul secara konsisten dari data.

Indikator penelitian dalam analisis ini merujuk pada tiga aspek utama: (1) Implementasi kebijakan zonasi, yang meliputi transparansi, sosialisasi, mekanisme seleksi, dan hambatan dalam proses penerimaan siswa; (2) Pemerataan akses pendidikan, yang diukur melalui keterwakilan siswa dari berbagai wilayah zonasi, latar belakang sosial ekonomi, serta persepsi terhadap keadilan dalam proses PPDB; dan (3) Dampak zonasi terhadap sekolah, termasuk perubahan komposisi siswa, dinamika internal sekolah, dan respons dari masyarakat sekitar. Ketiga indikator ini dijabarkan untuk memberikan gambaran komprehensif

atas keterkaitan antara kebijakan zonasi dan realisasi akses pendidikan yang merata.

Dengan rancangan metode seperti ini, penelitian diharapkan mampu memberikan informasi mendalam dan akurat mengenai keberhasilan serta tantangan implementasi kebijakan zonasi di SMKN 2 Praya Tengah. Temuan dari penelitian ini tidak hanya relevan bagi sekolah dan pemerintah daerah, tetapi juga dapat menjadi rujukan untuk penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, terutama dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan menengah kejuruan..

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan zonasi pendidikan di SMKN 2 Praya Tengah menunjukkan peran strategis dalam membuka akses pendidikan bagi siswa dari keluarga menengah ke bawah dan wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan. Penerapan sistem zonasi memungkinkan siswa dari desa-desa sekitar yang sebelumnya jarang mengakses sekolah negeri karena kendala jarak dan biaya transportasi kini dapat bersekolah lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Kondisi ini memberikan keadilan akses dan mendorong peningkatan partisipasi pendidikan bagi anak-anak dari wilayah yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi.

Dengan kebijakan zonasi, peluang untuk masuk sekolah negeri tidak lagi semata-mata bergantung pada prestasi akademik atau kekuatan finansial, tetapi lebih menekankan pada kedekatan domisili siswa terhadap sekolah. Ini membantu mengatasi dominasi siswa dari kelompok ekonomi atas yang sebelumnya lebih mudah mengakses sekolah unggulan di kota. Keberadaan zonasi memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa dari latar belakang yang beragam untuk merasakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif (Akhyar, 2021).

Secara tidak langsung, sistem zonasi juga berdampak pada pemerataan distribusi siswa ke berbagai sekolah negeri. Sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati mulai menerima siswa dalam jumlah yang signifikan, termasuk SMKN 2 Praya Tengah. Fenomena ini mendorong sekolah-sekolah untuk berbenah dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan guna menjawab kebutuhan siswa yang lebih beragam dari sebelumnya. Ini merupakan langkah awal dalam menciptakan keadilan dalam pemerataan mutu pendidikan antarwilayah.

Namun, perlu dicermati bahwa pemerataan akses belum sepenuhnya disertai dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya sekolah. Di SMKN 2 Praya Tengah, lonjakan jumlah peserta didik dari zona sekitar menyebabkan kelebihan kapasitas ruang kelas. Sekolah harus menambah jumlah siswa per kelas, yang

pada akhirnya berdampak pada kualitas interaksi antara guru dan peserta didik. Guru kesulitan memberikan perhatian individu yang cukup, sehingga efektivitas pembelajaran berpotensi menurun.

Selain interaksi yang terbatas, kapasitas fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, ruang praktik, dan sarana olahraga menjadi tantangan tersendiri. Ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan fasilitas dapat menciptakan suasana belajar yang kurang kondusif dan menurunkan motivasi belajar siswa. Suasana kelas yang terlalu padat menghambat fleksibilitas dalam proses pembelajaran yang kreatif dan aktif.

Kelebihan kapasitas ini juga berdampak pada beban kerja guru. Mereka tidak hanya harus mengajar lebih banyak siswa, tetapi juga menghadapi keberagaman karakteristik dan kemampuan belajar yang lebih luas. Tekanan kerja yang meningkat tanpa diimbangi pelatihan dan dukungan yang memadai bisa menyebabkan penurunan kualitas pengajaran, dan dalam jangka panjang menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang holistik (Akhyar, 2021).

Salah satu tantangan besar lainnya dalam implementasi zonasi adalah munculnya resistensi dari masyarakat, khususnya dari kalangan orang tua dan siswa yang memiliki prestasi namun tinggal di luar zona. Mereka merasa dirugikan oleh pembatasan kuota jalur prestasi, yang selama ini menjadi jalan utama masuk ke sekolah unggulan. Akibatnya, muncul persepsi ketidakadilan karena kebijakan zonasi dinilai mengabaikan potensi akademik individu.

Persepsi negatif terhadap sistem zonasi diperparah oleh kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak sekolah dan pemerintah. Banyak orang tua belum memahami alasan dan manfaat di balik kebijakan ini, sehingga memandangnya sebagai bentuk pembatasan, bukan pemerataan. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang transparan dan edukatif agar masyarakat lebih memahami dan mendukung tujuan kebijakan (Mareta et al., 2021).

Ketimpangan kualitas antar sekolah menjadi isu yang belum terselesaikan. Meskipun zonasi mendistribusikan siswa secara lebih merata, jika mutu sekolah tidak merata, maka siswa yang berada di zona kurang berkembang tetap menghadapi tantangan pendidikan yang signifikan. Di SMKN 2 Praya Tengah, keterbatasan guru kompeten dan metode pembelajaran inovatif masih menjadi hambatan dalam menyediakan pendidikan bermutu bagi semua siswa.

Risiko terbesar dari ketimpangan mutu ini adalah terjadinya ketimpangan hasil belajar. Siswa dari wilayah kurang maju yang masuk ke sekolah dengan kualitas rendah tidak akan memperoleh pengalaman pendidikan yang setara dengan rekan-rekannya di

sekolah kota. Ini pada akhirnya berpotensi memperkuat ketimpangan sosial dan menghambat mobilitas sosial generasi muda dari daerah tertinggal (Uluwiyah, Fauziah, & Fariha, 2021).

Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan di semua sekolah, khususnya yang berada di zona pinggiran, harus menjadi prioritas dalam kebijakan zonasi. Pemerintah harus menjamin tersedianya guru berkualitas, fasilitas yang memadai, serta kurikulum yang relevan dan kontekstual. Tanpa upaya ini, pemerataan akses hanya akan menjadi pencapaian administratif yang tidak membawa dampak signifikan terhadap keadilan hasil pendidikan.

Peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam mendukung keberhasilan zonasi. Dukungan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas, tetapi juga penguatan kapasitas guru melalui pelatihan, serta kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal. Di SMKN 2 Praya Tengah, dukungan pemerintah daerah berupa perbaikan sarana sudah mulai dirasakan, namun masih membutuhkan perencanaan yang lebih terarah agar hasilnya berkelanjutan (Junaedy, Mardika, & Yudhiantara, 2021).

Penting pula adanya koordinasi lintas sektor antara dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat agar tantangan yang muncul dalam implementasi zonasi dapat ditangani secara cepat dan tepat. Komitmen bersama antar pemangku kepentingan pendidikan menjadi kunci agar kebijakan zonasi benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan keadilan sosial secara menyeluruh.

Di sisi lain, zonasi juga membawa dinamika baru dalam lingkungan sekolah. Dengan masuknya siswa dari latar belakang sosial dan budaya yang lebih beragam, sekolah dituntut untuk membangun iklim inklusif dan toleran. SMKN 2 Praya Tengah mulai mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler dan program penguatan karakter yang mendorong integrasi sosial, seperti kegiatan olahraga bersama, seni, dan diskusi kelompok.

Upaya membangun budaya sekolah yang inklusif sangat penting untuk mencegah konflik sosial akibat perbedaan latar belakang siswa. Manajemen sekolah yang adaptif perlu terus dikembangkan agar semua siswa merasa dihargai dan mendapat kesempatan belajar yang setara. Strategi ini akan memperkuat kohesi sosial di lingkungan sekolah serta mendukung terciptanya suasana belajar yang positif dan produktif (Gunawan, Sugito, & Pardi, 2020).

Dengan demikian kebijakan zonasi membawa dampak positif terhadap perluasan akses pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Namun, tantangan dalam aspek kualitas, resistensi masyarakat, dan

kesiapan infrastruktur pendidikan perlu ditangani secara serius. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat mutlak diperlukan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana pemerataan, tetapi benar-benar mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan bermutu di seluruh wilayah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi kebijakan zonasi di SMKN 2 Praya Tengah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah berhasil membuka akses pendidikan yang lebih merata, khususnya bagi siswa dari wilayah pedesaan dan kurang mampu, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Namun, keberhasilan tersebut masih menghadapi tantangan signifikan seperti kelebihan kapasitas ruang kelas, keterbatasan fasilitas dan guru berkualitas, resistensi masyarakat, serta ketimpangan mutu antar sekolah. Efektivitas zonasi sangat bergantung pada dukungan kebijakan lanjutan seperti peningkatan sarana prasarana, pelatihan guru, perencanaan strategis, serta komunikasi dan partisipasi publik yang lebih intensif. Oleh karena itu, zonasi perlu dipandang tidak hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai langkah awal menuju transformasi pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Heri Hadi Saputra, M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Pendidikan, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berharga selama proses pembelajaran. Semoga ilmu yang telah Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat besar dan dapat kami aplikasikan secara efektif dalam tugas kami sebagai pendidik di berbagai tempat pengajaran.

Daftar Pustaka

- Akhyyar, M. (2021). *Implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan akses pendidikan dasar di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 123-135.
- Gunawan, I. M., Sugito, & Pardi, H. (2020). Dampak kebijakan zonasi terhadap beban kerja guru dan dinamika pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 15(1), 45-58.
- Junaedy, R., Mardika, P., & Yudhiantara, R. (2021). Sosialisasi kebijakan zonasi dan tantangan implementasinya di daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pendidikan*, 7(3), 89-101.

- Mareta, N., Puspitasari, D., & Rahmawati, E. (2021). Evaluasi kebijakan zonasi dalam PPDB dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. *Jurnal Evaluasi Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 60–75.
- Sabrina, R., & Ishak, A. (2021). Zonasi sebagai strategi pemerataan pendidikan: Analisis peluang dan tantangan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(1), 34–46.
- Uluwiyah, I., Fauziah, N., & Fariha, N. (2021). Ketimpangan mutu antar sekolah dan dampaknya terhadap implementasi kebijakan zonasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kebijakan*, 6(2),